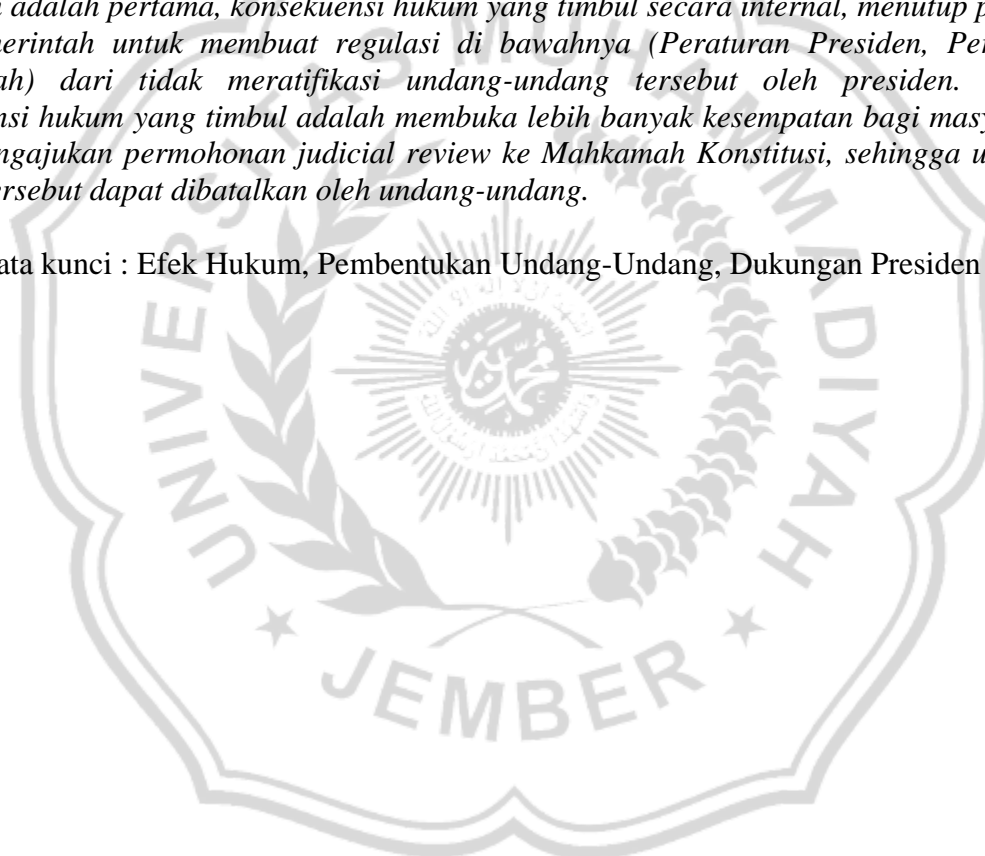


## ABSTRAK

Rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan dari Presiden dan DPR, namun dalam proses ratifikasi, presiden tidak menyetujuinya, ketentuan ini diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberlakuan undang-undang yang belum diratifikasi dan ditandatangani oleh Presiden, yang bertanggung jawab atas kekuasaan eksekutif, tentunya memiliki berbagai konsekuensi hukum bagi kepatuhan publik terhadap undang-undang yang telah ditetapkan. Ketika undang-undang yang telah diperdebatkan dan disepakati tidak diratifikasi dan ditandatangani oleh presiden, hal ini tentu memiliki konsekuensi hukum bagi pemerintahan pemerintah. Tujuan dari penelitian yang diteliti adalah konsekuensi hukum yang timbul dari pembentukan undang-undang tanpa pengesahan oleh Presiden.. *Jenis penelitian yang digunakan adalah penulisan Yuridis Normatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Hasil penelitian adalah pertama, konsekuensi hukum yang timbul secara internal, menutup peluang bagi pemerintah untuk membuat regulasi di bawahnya (Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah) dari tidak meratifikasi undang-undang tersebut oleh presiden. Kedua, konsekuensi hukum yang timbul adalah membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, sehingga undang-undang tersebut dapat dibatalkan oleh undang-undang.*

Kata kunci : Efek Hukum, Pembentukan Undang-Undang, Dukungan Presiden



## ABSTRACT

A draft law that has received approval from the President and the DPR, but in the ratification process, the president did not approve it, this provision is regulated in the provisions of Article 20 paragraph (5) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The enactment of a law that has not been ratified and signed by the President, which is responsible for executive power, of course has various legal consequences for public compliance with the laws that have been established. When a law that has been debated and agreed upon is not ratified and signed by the president, this of course has legal consequences for government governance. The aim of the research studied is the legal consequences that arise from the formation of laws without ratification by the President.

The type of research used is Normative Juridical writing. The research methods used in this research are the statutory approach, conceptual approach and historical approach.

The results of the research are first, the legal consequences that arise internally, close the opportunity for the government to make regulations under it (Presidential Regulations, Government Regulations) from not ratifying the law by the president. Second, the legal consequences that arise are that it opens up more opportunities for the public to submit requests for judicial review to the Constitutional Court, so that the law can be canceled by law.

**Keywords :** *Legal Effects, Formation Of Laws, Endorsement Of The President*

